

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Australia telah menjadi koloni Inggris pada tahun 1788. Australia menjadi negara merdeka setelah 6 negara bagiannya bergabung menjadi federasi sejak 1 Januari 1901. seperti bekas jajahan Inggris lainnya, Australia juga masuk dalam negara-negara persemakmuran. Akan tetapi Inggris masih menancapkan kekuasaannya dengan diutusnya seorang gubernur jenderal di Australia sebagai perpanjangan tangan dari Ratu Inggris. Hal ini menimbulkan suatu perasaan ingin menjadi diri sendiri, lepas dari bayang-bayang Inggris; yang diartikan sebagai nasionalisme Australia.

Isu republikanisme yaitu mengganti ratu Inggris dengan presiden Australia sebagai kepala negara, banyak mendominasi politik Australia di akhir 1990-an. Kaum muda Australia, yang merasa bahwa ikatan konstitusi dengan Inggris tidak lagi relevan dan satu-satunya cara untuk maju adalah menyatakan Australia sebagai negara republik. Namun demikian, referendum nasional yang diadakan di tahun 1999 menghasilkan fakta bahwa keadaan belum dapat diubah. Hal tersebut juga menjadi pengaruh terhadap pembentukan republik Australia yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana rasa nasionalisme mereka.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkatnya sebagai kajian penelitian dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu penulis memilih *PERSEPSI MASYARAKAT AUSTRALIA TERHADAP GAGASAN PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK AUSTRALIA* sebagai judul skripsi ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Ingin menggambarkan bagaimana sesungguhnya dinamika kehidupan masyarakat Australia yang mengalami perubahan dari masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Yang pada akhirnya penulis berusaha untuk menelaah dan mencoba mengungkapkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat Australia terhadap gagasan pembentukan negara republik Australia yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana rasa nasionalisme mereka.
- b. Dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan dan menjawab permasalahan yang ada.
- c. Untuk kepentingan penulis sebagai pendalam lebih lanjut terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan manifestasi dari penerapan teori – teori yang pernah penulis peroleh selama mengikuti ataupun menempuh kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional,

... ..

- d. Guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara demografi masyarakat Australia telah mengalami perubahan komposisi penduduk yang memiliki implikasi cukup berarti bagi reformasi ketatanegaraan. Pada awal terbentuknya, komunitas yang mendiami Australia dapat dikatakan homogen. Tetapi dewasa ini Australia merupakan wadah masyarakat yang beraneka ragam etnis dan budaya.

Heterogenitas etnis di Australia ini sudah bisa dikatakan dilema Australia sebagai sebuah bangsa. Bagi Australia, melalui penerapan kebijakan multikultural, persoalan ini akan dapat diatasi, sesuai dengan kapasitas Australia sebagai sebuah bangsa yang tengah berupaya mencari identitasnya ditengah lingkungan dan kawasan Asia-Pasifik.

Benua Australia yang terletak terpencil dari lingkungan asli masyarakat kulit putih atau etnis Eropa, umumnya mewarisi seluruh pranata sistem yang dibawanya dari Inggris. Dengan sistem kapitalis inilah Australia yang nampak sekarang. Keberadaannya mencerminkan sosok Inggris di kawasan Asia Pasifik.

Wujud Australia modern sekarang yang bercorak Eropa centris ini telah menimbulkan beberapa implikasi, terutama berhubungan dengan faktor etnis yang meliputi diversifikasi nilai-nilai, sikap dan keinginan, yang mana perbedaan yang

Australia ini. Isu-isu mengenai identitas Australia maupun nasionalisme dalam rangka konsep politik sebagai alat pemersatu bangsa memang belum tertuang secara konstitusional, namun Australia mampu menyatukan etnik-etnik tersebut sebatas kapasitas domestik Australia.

Seperti kita ketahui bahwa bentuk negara Australia adalah monarki konstitusional yaitu ratu Inggris yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan ratu Inggris atau kerajaan di mana Ratu Inggris berfungsi sebagai kepala eksekutif. Ratu Inggris diwakili oleh seorang gubernur jenderal Australia, yang dijalankan para menteri yang bertugas memimpin departemen. Namun demikian, dalam prakteknya pelaksanaan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang perdana menteri yang dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet.

Dalam *The Constitution of The Commonwealth of Australia* disebutkan bahwa Australia diperintah oleh Monarki Inggris melalui wakilnya seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal memiliki kekuasaan untuk membuka dan membubarkan parlemen, menyetujui rancangan undang-undang, dan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Australia. Pengangkatan seorang gubernur jenderal dilakukan berdasarkan rekomendasi perdana menteri dan disetujui oleh ratu Inggris.

Australia sebenarnya sudah terlepas dari koloni Inggris sejak 1 Januari 1901, ditandai dengan lahirnya Persemakmuran Australia. Akan tetapi Inggris masih menancapkan kekuasaannya dengan diutusnya seorang gubernur jenderal di Australia

dalam status yang tidak menentu. Jika dikategorikan sebagai sebuah negara kolonial, dalam realitasnya Inggris tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun demikian bila dikelompokkan sebagai sebuah negara yang merdeka, kekuasaan Inggris merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dari kerangka konstitusi negara tersebut. Kekaburan status tersebut akan menyulitkan negara Australia dalam menjalankan peranannya dalam dunia internasional. Bangsa Australia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya merdeka, dan mereka juga merasa bahwa Inggris terlalu mencampuri urusan mereka. Karena hal itulah, maka hubungan Australia dan Inggris menjadi melemah.

Pada tahun 1967-an ada sebuah pengumuman yang semakin memperlemah ikatan Australia-Inggris, yaitu bahwa pemerintahan Inggris masuk ke dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Dengan demikian Inggris yang merupakan negara pengekspor utama negara-negara persemakmuran, mulai mengurangi jatahnya. Dan hal ini dirasa mengancam kondisi perekonomian Australia. Maka Australia pun mulai menjaga jarak dengan Inggris akan tetapi saat terjadinya negosiasi untuk pemutusan hukum dan konstitusional terhadap Inggris, terjadi peristiwa pemecatan PM Gough Whitlam oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr yang merupakan wakil kerajaan di Australia semakin mengukuhkan buruknya citra Inggris di mata masyarakat Australia. Peristiwa 1975 secara terang-terangan mengisyaratkan bahwa masih besarnya campur tangan Kerajaan Inggris dalam urusan pribadi atau urusan

Dampak dari krisis tahun 1975 adalah rusaknya citra gubernur jenderal di mata masyarakat Australia. Implikasi lebih lanjut adalah timbulnya pemikiran politis untuk membentuk Australia menjadi sebuah negara republik dengan melepaskan beberapa lembaga dalam proses politik yang berlaku selama ini.¹

Krisis Konstitusi 1975 dan ide Republik Australia menyadarkan bangsa Australia tentang hakikat jati diri dan sistem politik yang mereka gunakan selama ini beserta kelemahan-kelemahannya. Kombinasi antara sistem politik Amerika Serikat dan Inggris tidak selamanya sesuai dan saling melengkapi dengan kondisi bangsa Australia yang bergerak dinamis. Bentuk negara republik diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dewasa ini.

Sebenarnya upaya pembentukan negara republik telah berakar sejak tahun 1890-an dengan perjuangan kaum nasionalis. Nasionalisme Australia, menurut para penganjurnya yang mendirikan sekolah dan majalah *The Bulletin* sejak 1890-an, merupakan keyakinan bahwa bangsa Australia yang baru haruslah melepaskan diri dari *ketidaksamaan* dan “tirani” kebangsawanan dari dunia lama.²

Gencarnya gerakan republiken ini juga didukung oleh sebuah keinginan bersama untuk mewujudkan hal tersebut di atas pada 100 tahun perayaan Australia. Dalam pertemuan tahunan Partai Buruh di Tasmania, PM Keating yang berasal dari Partai Buruh memberikan janji tersebut kepada seluruh masyarakat pendukung

¹ Zelman Cowen, “*The Office of Governors General*” dalam “*Australia The Daedalus Symposium*”, Stephen, R. Graubard, Angus, New south Wales, 1985, hal. 146

republik. Dengan bentuk republik ada anggapan merupakan sebuah bentuk kemandirian dan kemerdekaan Australia yang sejati. Nasionalisme Australia lebih mentikberatkan pada keinginan lepasnya Australia dari embel-embel ke-Inggrisan. Agaknya gencarnya isu republik semakin menyudutkan pemerintah saat itu, yang kemudian pada tahun 1998 diadakan sebuah Konvensi Konstitusi Puncak yang dihadiri banyak delegasi dari masing-masing negara bagian di Australia.

Isu republikanisme yaitu mengganti Ratu Inggris dengan Presiden Australia sebagai kepala negara, banyak mendominasi politik Australia di akhir 1990-an. Semakin banyak orang, khususnya kaum muda Australia, yang merasa bahwa ikatan konstitusi dengan Inggris tidak lagi relevan dan satu-satunya cara untuk maju adalah menyatakan Australia sebagai negara republik. Namun demikian, referendum nasional yang diadakan di tahun 1999 menghasilkan fakta bahwa keadaan belum dapat diubah.

Rencana pembentukan Republik Australia merupakan sebuah ide yang tumbuh di masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan ketika Australia resmi ditetapkan sebagai sebuah penjara terbuka, telah berkembang pemikiran diantara komunitas yang mendiaminya untuk membentuk sebuah negara yang mandiri. Status kolonial yang diberikan Inggris terhadap benua tersebut dianggap sebagai sebuah

dari proses ini adalah sebuah kemerdekaan politik melalui diproklamasikannya Republik Australia yang bersendikan nilai-nilai demokrasi.³

Pergerakan kelompok pendukung republik diharapkan akan menjadi simbol baru bagi identitas Australia sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh. Esensi dari gagasan pembentukan republik Australia adalah merombak struktur hubungan kekuasaan antara Australia dengan Kerajaan Inggris melalui perubahan status dari sebuah negara semi kolonial menjadi negara yang merdeka dan mandiri.

D. POKOK PERMASALAHAN

Dari penggambaran diatas, muncul permasalahan yakni “Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Australia Terhadap Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia?”

E. KERANGKA TEORI

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan Teori Identitas, Teori Persepsi, dan Konsep Nasionalisme. Dan diharapkan dari ketiga teori diatas, bisa menjelaskan fenomena yang terjadi.

1. Teori Identitas

Untuk menjelaskan fenomena yang terjadi penulis uraikan definisi teori identitas yang dikemukakan oleh Peter L. Berger, Pius A. Partanto, dan M Dahlan Al Barry yang mengasumsikan bahwa:

cara individu, suatu bangsa mendefinisikan diri mereka sendiri untuk kemudian memproyeksikan rencana-rencana kehidupan dalam berbagai dimensi di masa depan.⁴ Selain itu identitas juga diartikan sebagai keidentikan, tanda pembuktian sama atas diri atau tanda pengenalan diri. Dalam bahasa lain adalah bahwa teori identitas merupakan nama lain dari teori aspek ganda yang menyatakan bahwa jiwa dan materi adalah ekspresi dari suatu realitas yang kita tidak mengetahui hakekatnya.⁵

Salah satu sumber identitas kebangsaan adalah rencana kehidupan rakyat satu bangsa yang memiliki banyak paket rencana kehidupan yang meliputi dimensi-dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Identitas secara khusus bersifat terbuka. Menurut Peter L. Berger dan George Herbert Mead, bahwa dalam cara yang mendasar sekalipun. Manusia dalam semua masyarakat selalu berlainan arah dan oleh karenanya menjadi lebih terbuka sifatnya. Jadi ciri terbuka, tanpa batas dalam masyarakat modern akan dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang bersifat psikologis dan membuat suatu bangsa mudah mengalami perubahan definisi diri oleh orang, bangsa atau negara.

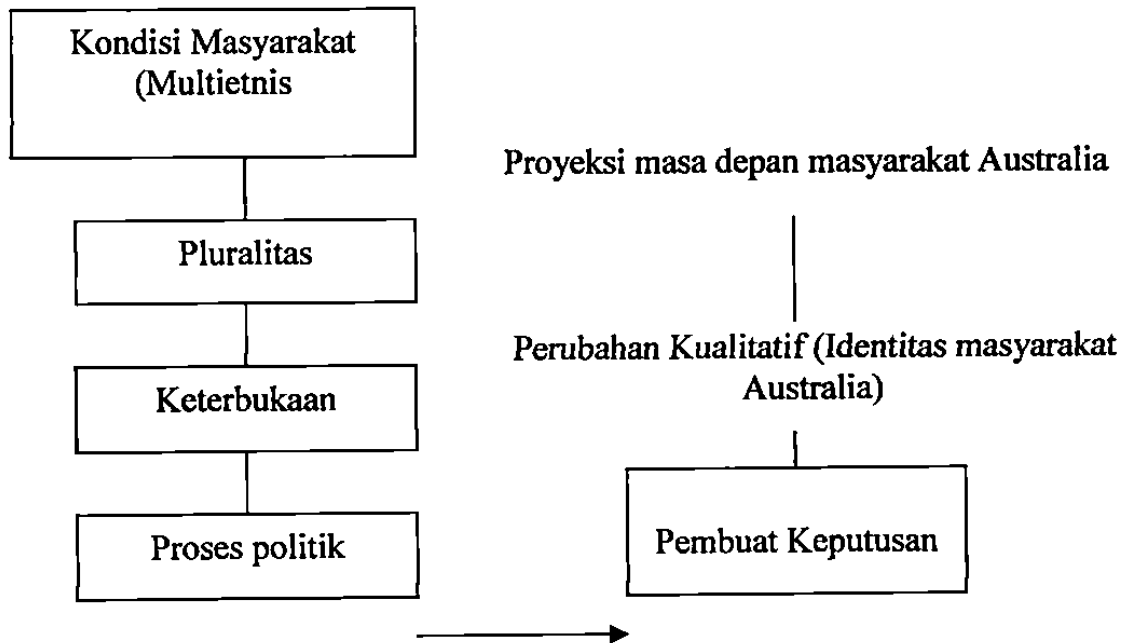
Perubahan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam teori identitas adalah input-input penting bagi proses kehidupan politik domestik di suatu bangsa. Hambatan psikologis yang timbul mungkin berupa rasa curiga Akan

⁴ Peter L. Berger, *Pluralisasi Dunia Kehidupan Sosial : Teori-teori Masyarakat Modern*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm 46

sesuatu yang “berbeda” diantara masyarakat. Namun sebagai bangsa yang modern cara berpikirnya, justru semakin besar pula kemungkinan kearah perubahan kualitatif.

Selanjutnya dalam identitas masyarakat modern secara khusus, identitas bersifat relatif, untuk kemudian diindividualisasikan. Dalam tahap ini para pembuat keputusan dipaksa untuk membuat keputusan yang tidak saja menyangkut dunia luar dalam tatanan objektif, melainkan juga subjektifitas individu, khususnya perihal identitasnya. Baru setelah diindividualisasikan, maka akan mudah dicapai. Porsi-porsi pokok yang berisi mekanisme sistem politik, keterbatasan individu dan kebutuhan individu. Untuk selanjutnya para pembuat keputusan akan menentukan bagaimana proyeksi masa depan suatu bangsa berdasarkan perubahan kualitatif tentang identitas nasional mereka.

4.1. Dalam keadaan dapat ditunjukkan sebagai berikut :



Sumber : Peter L. Berger, *Pluralisasi Dunia Kehidupan Sosial : Teori-teori Masyarakat Modern*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm 47..

Identitas seperti disebutkan teori identitas dalam konteks masyarakat Australia yang multi etnis ini merupakan sebuah pengalaman yang aktual dalam situasi kondisi sosial politik tertentu. Australia yang terdiri dari banyak etnis dan budaya membutuhkan adanya satu rasa pengikat identitas yang bisa dimiliki oleh semua masyarakat. Namun sebagai sebuah bangsa yang rasional dan modern tentunya identitas yang modern pula yang diinginkan rakyat dan pemerintah australia. Dimana dalam masyarakat modern seperti Australia yang memiliki sifat atau ciri terbuka, tanpa batas dapat menimbulkan hambatan-hambatan yang bersifat psikologis.

Tapi keterbukaan yang dimaksud tersebut diatas terbatas hanya pada

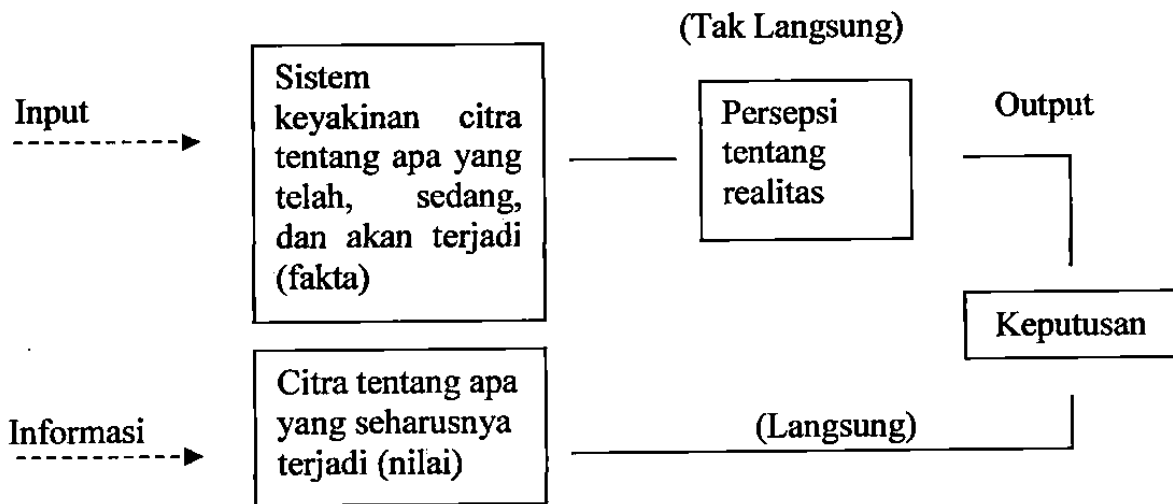
depannya. Telah menjadi semacam pluralitas sosial dalam kehidupan masyarakat Australia yang bercorak multi etnis tersebut yakni antara imigran-imigran yang datang dari Eropa atau Asia dengan penduduk asli tanpa mengesampingkan prosentase dan komposisi penduduknya, yang jelas pluralitas sosial tersebut mempunyai implikasi yang serius bagi pembentukan identitas masyarakat Australia dalam ruang lingkup nasional secara modern. Apa yang khusus atau spesifik dalam masyarakat modern, terletak pada tingkat keterbukaannya.

Berdasarkan itulah maka melihat kondisi masyarakat Australia yang multi etnis, memiliki kecenderungan terdapat kelompok-kelompok yang berbeda dari yang lain. Sehingga mereka merasa berhak bahwa identitas kolektif adalah identitas mereka. Masyarakat Australia telah merubah tatanan realitasnya. Mereka menganggap bahwa sejarah nenek moyang mereka dan generasi tua yang hidup kini, sudah tidak relevan jika masih diterapkan oleh generasi muda Australia sekarang.

2. Teori Persepsi

Teori Persepsi ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan psikologi yang mempengaruhi persepsi itu, misalnya untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya. Persepsi dibangun berdasarkan rangkaian data dan analisa yang

Gambar 1.1



Sumber : Holsti, Ole. R, *The Belief System and National Images: A Case Study*, dikutip dalam Bruce Russett dan Harvey Starr, *World Politics*, (New York: Freeman, 1985), hal.304

Dari diagram tersebut maka dapat dijelaskan, mula-mula nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan. Ini meliputi realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan serta preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Dalam Hal ini terdapat dua jenis citra yaitu, yang terbuka dan yang tertutup. Citra yang terbuka menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang dipegang selama ini, dan kemudian menggabungkannya dengan citra yang telah dipegang itu. Bahkan

Citra yang tertutup karena alasan-alasan psikologis, menolak perubahan dan karenanya mengabaikan informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu dari informasi yang masuk yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada. Tetapi, baik terbuka maupun tertutup, citra berfungsi sebagai saringan persepsi yang didasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya adalah proses seleksi.

Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan citra atau model tentang semua yang dianut seseorang. Menurut Holsti, system keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra- citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan, dan preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi.

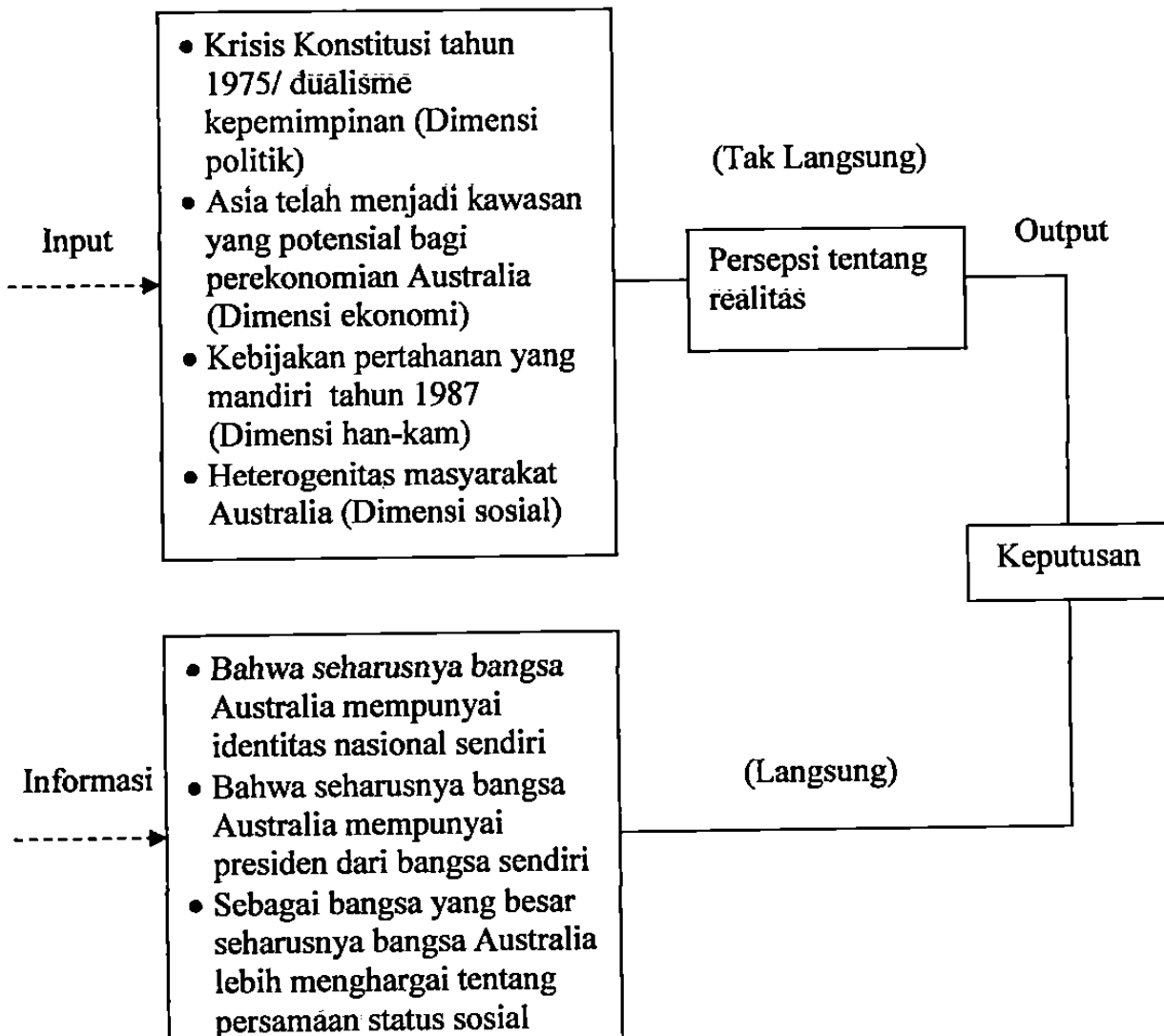
Dengan kata lain, keyakinan ini dianggap sebagai stimulus yang akhirnya diinterpretasikan menjadi citra. Citra seperti yang disebutkan dalam teori persepsi ini menjadikan masyarakat Australia mengambil dua citra yaitu terbuka dan tertutup. Citra yang terbuka dalam masyarakat Australia adalah yang mau menerima semua informasi yang baru tentang mereka, walaupun bertentangan dengan citra yang selama ini mereka pegang dan menggabungkannya dengan citra yang telah dipegang..Dalam kasus ini bisa dianalogikan sebagai citra bahwa bangsa Australia adalah keturunan Inggris atau Eropa, namun bukan tidak mungkin Australia mempunyai sebuah warisan budaya baru yang didapat

baru yang mampu mengikat keseluruhan etnis yang ada dan mampu membentuk sebuah identitas baru yang menggambarkan Australia yang sesungguhnya.

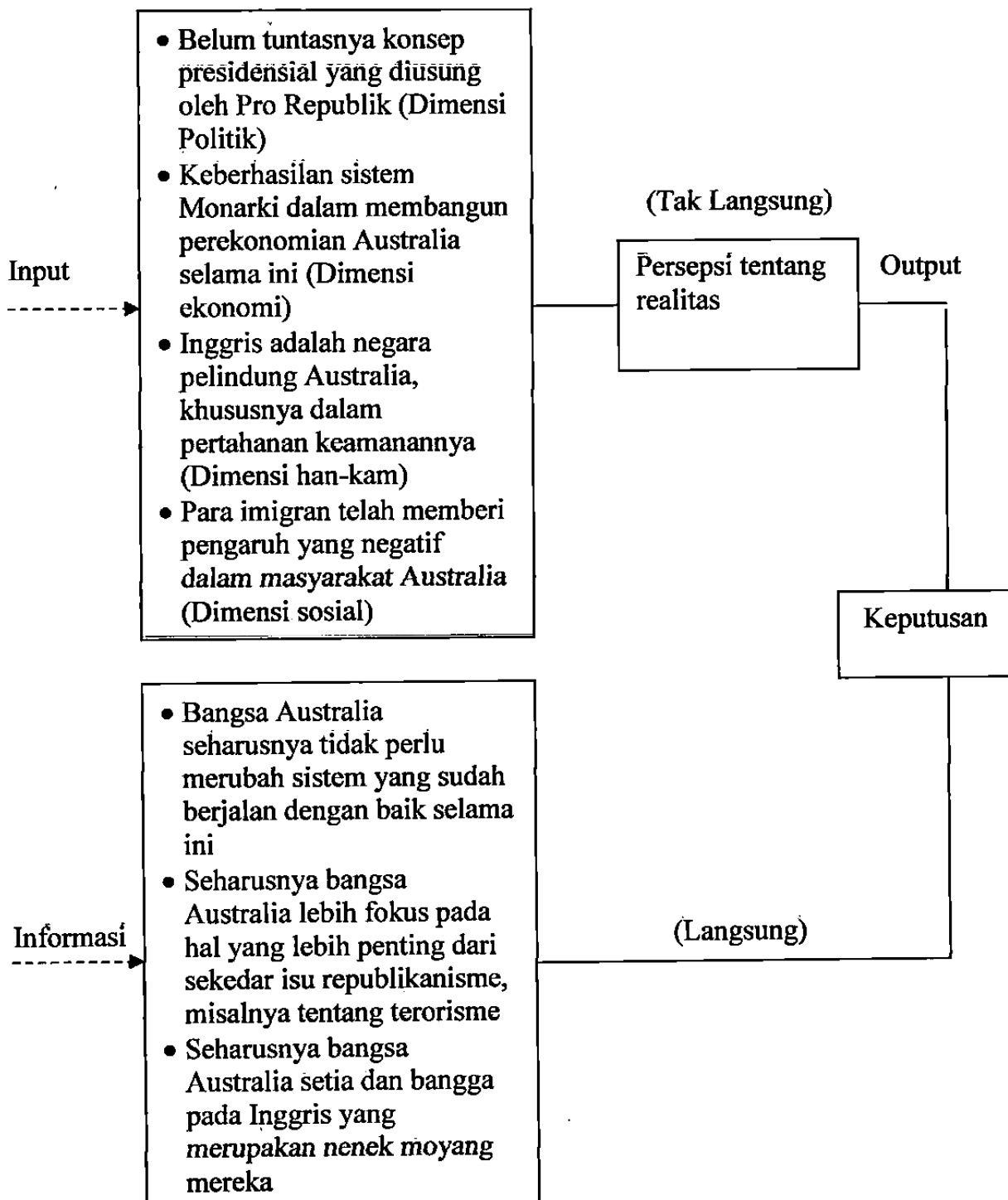
Citra yang tertutup seperti tersebut dalam teori ini yang menolak perubahan dalam masyarakat Australia yang tetap ingin Australia mewarisi nilai budaya Inggris sebagai nilai budaya yang dominan dan akhirnya akan membawa citra atau persepsi bahwa identitas Australia adalah juga identitas Inggris.

Dengan demikian dapat dikatakan hipotesis teori persepsi adalah bahwa setiap tindakan individu dipengaruhi atau ditentukan oleh nilai yang dianutnya. Nilai yang dianut ini sebelumnya dikontraskan dengan kenyataan yang ada dan

Gambar 1.2
Sistem Keyakinan Pro Republik



Gambar 1.3
Sistem Keyakinan Pro Monarki



Pada awalnya masyarakat Australia sangat membanggakan nilai-nilai dan budaya Eropa khususnya tradisi Inggris dan menganggap sebagai kebudayaan yang tinggi. Namun, dewasa ini terlihat bahwa kepercayaan tersebut telah berubah, bangsa Australia lebih bangga akan Australia sebagai bangsa yang "*berbeda*" dibandingkan sebagai sebuah bangsa yang dulunya berakar kepada budaya Inggris.

Persepsi masyarakat Australia terhadap gagasan pembentukan negara republik Australia adalah bahwa sebagian masyarakat Australia menganggap warisan budaya nenek moyang mereka yang dari leluhurnya Inggris adalah merupakan juga identitas mereka. Yang pada akhirnya menimbulkan sikap bangga pada leluhurnya. Dan sebagian lagi karena dewasa ini terlihat bahwa kepercayaan tersebut telah berubah, menganggap bahwa masyarakat Australia sekarang lebih dewasa dalam menentukan arah kebijakannya dan masa depannya sendiri tanpa harus bergantung pada negara induknya, Inggris. Menurut kelompok yang pro republik, bangsa Australia harus mampu membentuk identitasnya sendiri, lepas dari cengkeraman Kerajaan, harus mampu menggantikan sistem monarki Inggris dengan sistem republik, dengan seorang presiden sebagai pemimpinnya, lagu negara, dan bendera kebangsaan Australia yang merupakan cerminan dari masyarakat Australia itu sendiri., yang beraneka ragam etnis dan suku. Sedangkan kelompok yang kontra republik,

... dan masalah besar akan perubahan yang dilakukan. Mereka lebih

cenderung mempertahankan nilai-nilai yang telah ada yakni nilai-nilai warisan dari Inggris.

Berpijak pada hal di atas persepsi masyarakat Australia terhadap gagasan pembentukan negara republik Australia adalah bahwa sebagian masyarakat Australia menganggap warisan budaya nenek moyang mereka yang dari leluhurnya Inggris adalah merupakan juga identitas mereka. Yang pada akhirnya menimbulkan sikap bangga pada leluhurnya. Dan sebagian lagi menganggap bahwa sebagai negara yang merdeka sudah seharusnya Australia memiliki identitasnya sendiri.

1. Konsep Nasionalisme

Untuk lebih memahami tentang konsep nasionalisme, maka disini perlu diberikan pengertian negara-bangsa (*nation-state*) sebagai unit pelaksana dari nasionalisme. Negara adalah setiap kumpulan orang atau rakyat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan diorganisir secara politis di bawah satu pemerintahan. Negara memiliki unsur pokok yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Sedangkan pengertian bangsa adalah kumpulan penduduk dari suatu Negara yang bersatu di bawah satu pemerintahan yang merdeka.

Konsep nasionalisme ini masih memerlukan unit analisa yang lebih spesifik, yaitu apa yang disebut *nation building*. Secara asal kata *nation building* ini membangun sebuah negara baru. Rakyat di negara tersebut harus setia pada

konsep *nation state*, sebuah negara dituntut untuk memiliki satu bangsa saja. Langkah ini bisa dikatakan sebagai usaha untuk membentuk identitas nasional.

Menurut Benedict Anderson, *Nation* adalah komunitas politik dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan.⁸ Sesuatu yang dibayangkan atau terbayangkan karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak tahu, tidak kenal sebagian besar anggota lain, tidak bertatap muka bahkan mungkin tidak pula mendengar tentang mereka, namun di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.⁹

Salah seorang pencetus teori nasionalisme zaman dulu, Johann Gottfried Van Herder (1744-1803) menyatakan: *Bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah membentuk suatu kelompok, dan pada satu tingkat kelompok itu adalah bangsa. Kita dilahirkan dalam suatu "arus tradisi" yang membantu untuk mendefinisikan diri kita sebagai individu-individu.*¹⁰ *"Arus Tradisi" ini menciptakan nasional yang terdiri dari sebuah wilayah, sebuah sejarah, sebuah bahasa dan sering juga sebuah agama. Proses untuk menjadi sebuah bangsa yang seringkali disebut sebagai pembinaan bangsa, merupakan proses untuk*

⁸ Anderson, Benedict, *Imagined Communities*, Insist, Yogyakarta, 2001, hal.8

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Berlin, Isaiah, *The Bent Twig: A note on Nationalism*, Foreign Affairs, Jilid 50, No.1, 1972, Lihat

*menyatu bersama atau menggabungkan hal-hal ini menjadi suatu kemungkinan. Proses ini membentuk konsep suatu bangsa.*¹¹

Nasionalisme diperkuat oleh adanya tradisi, adat istiadat, dongeng, dan mitos.¹² Nasionalisme lahir dalam konteks historis yang subyektif sehingga tidak lama kemudian berubah menjadi ideologi yang mendasari lahirnya berbagai negara di kawasan bumi.¹³ Nasionalisme merupakan legitimasi politik paling akurat bagi negara-negara di dunia, sehingga ia merupakan wacana global sepanjang perkembangan peradaban modern hingga akhir abad ini.¹⁴ Semua ideologi dunia modern sama sekali tidak dapat dipahami tanpa menghubungkan dengan nasionalisme. Nasionalisme dapat menyatukan individu-individu dalam suatu negara, tetapi ia juga tidak jarang memisahkan mereka dari sebuah negara..

Nasionalisme Australia tidaklah semata-mata ekspresi yang anti Inggris dan anti kerajaan. Nasionalisme Australia, menurut para penganjurnya yang mendirikan sekolah dan majalah *The Bulletin* sejak 1890-an, merupakan keyakinan bahwa bangsa Australia yang baru haruslah melepaskan diri dari *ketidaksamaan* dan “tirani” kebangsawanan dari dunia lama.¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, Crasindo, Jakarta, 1993, hal.63

¹³ Mulkhan, Abdul Munir, *dalam Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal.15

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mulkhan, Abdul Munir, *op. cit.*, hal. 12

Menurut Hippiel, nasionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan politik yang mempunyai dua karakter. *Pertama*, kumpulan individu yang memberikan loyalitas utama mereka kepada etnik mereka atau komunitas bangsa mereka melebihi loyalitas mereka terhadap kelompok lainnya, misalnya berdasarkan pada kesamaan etnis atau ideologi politik. *Kedua*, kelompok etnis atau bangsa yang mempunyai keinginan untuk merdeka (*secession*).¹⁶

Masyarakat Australia sedang membangun kerangka nasionalismenya. Dan berhasil tidaknya hal tersebut, tergantung bagaimana proses penyatuan etnis-etnis yang ada di sana. Dengan dasar kebijakan multikulturalisme yang tepat, bukan tidak mungkin penyatuan etnis-etnis di Australia akan terwujud

F. HIPOTESA

Persepsi masyarakat Australia terhadap gagasan pembentukan negara republik Australia telah terpecah menjadi 2, yaitu *pertama*, persepsi yang mendukung (*pro*) terhadap gagasan pembentukan negara republik Australia. Yaitu menganggap bahwa bangsa Australia harus mampu membentuk identitas sendiri, lepas dari cengkeraman kerajaan, dan harus mampu menggantikan sistem monarki Inggris dengan sistem republik. *Kedua*, persepsi yang tidak mendukung (*kontra*) terhadap gagasan pembentukan negara republik Australia. Yaitu menganggap warisan budaya nenek

moyang mereka yang dari leluhurnya Inggris adalah merupakan juga identitas mereka. Yang pada akhirnya menimbulkan sikap bangga pada leluhurnya.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan batasan-batasan pembahasan agar tidak terlalu luas dan terfokus pada permasalahan yaitu dengan membahas perkembangan Australia dari tahun 1890-an. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan data-data di luar tahun 1890-an yang dianggap signifikan dan ada relevansinya dengan permasalahan yang diambil.

H. METODE PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis, artinya dengan penggambaran umum atas peristiwa/kejadian, kemudian dianalisa serta didapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menggali studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, majalah-majalah, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak, internet, dan sumber-sumber lain yang dianggap masih relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar teori yang telah ditetapkan. Meskipun menganalisa dengan data sekunder, penulis merasa yakin bahwa penelitian ini tidak

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Berkaitan dengan isi dari tulisan yang dibuat oleh penulis, yaitu tentang **PERSEPSI MASYARAKAT AUSTRALIA TERHADAP PEMBENTUKAN NEGARA REPUBLIK AUSTRALIA**. Penulis mencoba untuk menggambarkan bagaimana sesungguhnya dinamika kehidupan masyarakat Australia yang mengalami perubahan dari masyarakat yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Yang pada akhirnya penulis berusaha untuk menelaah dan mencoba mengungkapkan bagaimana hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat Australia terhadap gagasan pembentukan negara republik Australia. Agar memudahkan penulis untuk menganalisa, maka penulis menggunakan teori identitas, teori persepsi dan juga konsep nasionalisme. Keseluruhan tulisan ini dibagi kedalam lima bagian dengan uraian sebagai berikut:

Pada bab satu dibahas tentang pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang Dukungan Terhadap Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia yang berisi Pendahuluan, Argumen-Argumen Pendukung Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia yang berupa keyakinan-keyakinan dan fakta-fakta dukungan terhadap gagasan tersebut, kemudian berisi Organisasi-Organisasi Pendukung Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia

... dan yang terakhir

berisi Nilai-Nilai Pendukung Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia, diantaranya Nasionalisme, Egaliterianisme, Kepresidenan, dan Keanekaragaman.

Bab tiga membahas tentang Penolakan Terhadap Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia yang juga berisi Pendahuluan, Argumen-Argumen Pendukung Monarki Konstitusional yang berupa keyakinan-keyakinan dan fakta-fakta dukungan terhadap monarki konstitusional, kemudian berisi Organisasi-Organisasi Pendukung Monarki Konstitusional diantaranya Partai Koalisi dan Australian For Constitutional Monarchy, dan yang terakhir berisi Nilai-Nilai Pendukung Monarki Konstitusional, diantaranya Sejarah Masa Lalu, Kesetiaan, dan Monarki Konstitusional.

Pada bab empat dibahas Tentang Persepsi Masyarakat Australia Terhadap Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia. Dimana di dalamnya berisi Perkembangan Gagasan Republik Australia, dan juga Persepsi Masyarakat Australia Terhadap Gagasan Pembentukan Negara Republik Australia yang berupa pro dan kontra gagasan pembentukan negara republik Australia.

Tulisan ini akan diakhiri pada bab lima yang di dalamnya termuat rangkuman

.....